

ABSTRACT

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON APPLICATIONS FOR EARLY MARRIAGE DISPENSATION IN THE MAGETAN RELIGIOUS COURT

By:

Sunardi

Student ID: 212374201065

As in other developing countries, Indonesia also experiences updates to adapt to current circumstances and times. If deemed no longer relevant, the existing law will be abolished and replaced with a new one. This is what happened with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, specifically Article 7, which regulates the age limit for marriage. The new law will have an impact both on society and within law enforcement. The Religious Court's decision in adjudicating marriage dispensation cases must also be in accordance with the evidence and testimony presented during the trial to avoid violating the applicable law. This study employed qualitative descriptive research and a legal approach, applying data and statements obtained from interactions between the researcher, the research subjects, and the people present at the research site. The data analysis technique employed was data reduction, which means combining and determining core data, and focusing on the essentials. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 16 of 2019 impacted the Magetan Religious Court, with a surge in applications for marriage dispensations at the beginning of the new law's enactment and a decrease in the number of applications for early marriage dispensations the following year. However, this was also accompanied by the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, which regulates the procedures for adjudicating early marriage dispensation cases, making trials more complex than before. Judges also consider the detrimental impacts of a rejected application.

Keywords: Impact, Enactment, Early Marriage Dispensation

ABSTRAK

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Oleh:

Sunardi

NIM : 212374201065

Sebagaimana negara berkembang lainnya di Indonesia Undang – Undang yang berlaku juga mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masanya saat ini, apabila dirasa sudah tidak relevan maka Undang – Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru, inilah yang terjadi dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia dalam perkawinan. Dengan adanya Undang – Undang yang baru maka akan ada dampak yang timbul baik itu di masyarakat maupun di dalam perangkat penegak hukum. Pertimbangan putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi nikah juga harus sesuai dengan bukti dan kesaksian yang diajukan saat persidangan agar tidak mencederai Undang - Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang – Undang nomor 16 Tahun 2019 ini memberi dampak pada Pengadilan Agama Magetan dengan melonjaknya permohonan diskah diawal berlakunya undang undang yang baru, dan turunnya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi perkawinan dini pada tahun berikutnya, akan tetapi ini juga di iringi dengan disahkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara untuk megadili perkara dispensasi perkawinan dini sehingga dalam persidangan saat ini menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. dan pertimbangan hakim mempertimbangkan dampak mudharatnya jika permohonan itu ditolak.

Kata kunci: Dampak, permbarlakuan, Dispensasi Perkaiwnan Dini